

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Pembangunan Politik**

Pembangunan politik penulis jadikan sebagai *grand theory* yang nantinya akan dipakai sebagai pijakan dalam mengupas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Konsep pembangunan politik menurut Ramlan Surbakti dalam Gaul Kadir (2016:3) menjelaskan bahwa ada dua hal yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik. Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila, dan hal sejenisnya yang mendorong ke arah perbaikan (progresif).

Persoalannya ialah, apakah perubahan itu bersifat progresif, yaitu menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Situasi ini dapat berlaku dalam kondisi sosial politik masyarakat, tatkala suatu daerah tidak punya prinsip dan keinginan untuk menjalankan pembangunan politik. Berbagai aspek social politik yang mengarah pada

perbaikan akan sulit untuk terjadi, terkhusus memunculkan kepedulian maupun partisipasi dari elemen masyarakat.

Konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan. Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya.

Selanjutnya modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena itu modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang terdiferensiasi dan luwes, serta kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju (Ramlan Surbakti, dalam Gaul Kadir, 2016:3). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum.

Samuel P. Huntington memiliki pendapat yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam Aditiyawarman (2020; 2) menyampaikan bahwa pembangunan politik memiliki makna konotasi yang berbeda apabila

dilihat berdasarkan perspektif geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional.

Konsep geografis dimaknai sebagai telah terjadinya suatu proses perubahan politik yang dialami oleh negara-negara berkembang dengan meniru konsep sistem politik negara-negara yang telah maju seperti partisipasi politik, pemilihan umum, strategi kebijakan politik, dan hal terkait politik lainnya. Negara-negara maju seperti yang berada di wilayah eropa menjadi panutan bagi negara-negara berkembang yang tersebar di wilayah benua Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Konsep derivatif dimaknai bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik atas suatu proses yang berakibat pada perubahan yang menyeluruh. Perubahan ini dimaknai sebagai modernisasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, meningkatnya standar pendidikan, peningkatan kritisnya media massa, perubahan status sosial, dan lain-lainnya.

Konsep teologis dimaknai sebagai proses perubahan pada suatu tujuan sistem politik. Misalnya, stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi. dan sebagainya. Dengan didalamnya juga terdapat tujuan pembangunan suatu bangsa yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.

Konsep fungsional dimaknai sebagai perubahan yang akan membawa pada suatu sistem politik yang ideal dan dalam ukuran skala

wilayah negara. Sehingga muncul suatu sistem baru yang paling sesuai dengan keperluan masyarakat dalam suatu bangsa.

### **2.1.2 Definisi Pembangunan Politik**

Pembangunan politik dibangun oleh dua kata, yaitu pembangunan dan politik. Kata pembangunan menurut Ramlan Surbakti Dalam Aditiyawarman (2020; 2) mengacu pada makna perubahan politik sebagai akibat terjadinya perbedaan pada karakteristik dari suatu sistem politik asal ke sistem politik lain yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan pada struktur sosial masyarakat. Pembangunan politik identik dengan modernisasi karena dapat mempengaruhi perkembangan tatanan kehidupan secara menyeluruh seperti pada aspek ekonomi, pendidikan, urbanisasi, dan lain-lain.

Pembangunan politik dijadikan sebagai salah satu kajian dalam ilmu politik dengan tujuan untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang (Miriam Budiardjo, 2008; 146). Dalam jurnal yang dibuat oleh Lucian W. Pye dan Stephen Clarkson (1966), konteks dalam pembangunan politik ini lebih mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang, dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi, integrasi, dan demokratisasi yang belum berjalan dengan baik.

a. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi

Uraian di atas membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik adalah seharusnya sama dengan usaha pembentukan lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. Dalam pandangan banyak orang tersimpul anggapan bahwa pembangunan politik yang sungguh-sungguh bermakna adalah pembinaan demokrasi. Malah ada orang yang menekankan pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan baru berarti jika dikaitkan dengan suatu ideologi tertentu, apakah itu demokrasi, komunisme atau totalitarisme. Menurut pandangan ini, pembangunan hanya mempunyai makna bila ditujukan untuk memperkuat serangkaian nilai-nilai tertentu. Berpura-pura bahwa keadaan ini bisa dikesampingkan atau dihindari hanyalah merupakan penipuan diri sendiri.

Sekalipun banyak ditemukan contoh-contoh jelas yang menyamakan demokrasi dengan pembangunan, banyak timbul tantangan dalam ilmu-ilmu sosial terhadap pendekatan demikian itu. Menggunakan pembinaan demokrasi sebagai kunci pembangunan politik dapat dipandang sebagai suatu usaha memaksakan kepada bangsa lain nilai-nilai Barat.

Masalah hubungan antara demokrasi dengan pembangunan politik sangat rumit untuk dibahas dalam pandangan umum mengenai sikap-sikap yang berbeda-beda. Untuk sementara agaknya perlu diperhatikan bahwa banyak orang berpendapat bahwa secara asasi pembangunan

berbeda dengan demokrasi, dan justru usaha untuk memperkenalkan demokrasi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan.

Kaitannya dengan 234 SC Tasikmalaya, penulis memiliki motivasi untuk membuktikan apakah 234 SC berhasil memainkan peran pembangunan politik dalam aspek pembinaan demokrasi ataukah tidak. Karena berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, dengan adanya inisiasi untuk turut aktif dalam mendukung Anies-Imin dalam konstelasi Pilpres 2024, adalah sebagai suatu upaya partisipasi aktif dan kepedulian dalam proses demokrasi Indonesia. Penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam kaitannya dengan yang terjadi di Tasikmalaya.

b. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur

Perubahan sosial yang terjadi secara teratur dan hadirnya stabilitas berbagai aspek ditengah-tengah masyarakat merupakan hal konkret yang dihasilkan melalui pembangunan politik. Secara praksis suasana stabilitas dan perubahan teratur merupakan integrasi aspek politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi. Situasi demikian ketika terjadi secara nyata, akan memunculkan kondusifitas dan kesejahteraan yang terjadi pada level paling bawah di masyarakat.

Dalam arti yang lain, stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963).

Pandangan ini bisa diatasi pada bidang politik karena suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu melaksanakan dan mengendalikan perubahan sosial, dan bukan hanya menanggapi saja. Masyarakat menjadi actor dengan partisipasi aktif yang diberikan, jelas akan lebih “maju” daripada masyarakat yang apatis dan tidak tersentuh suatu proses pembangunan politik. Alhasil perbedaan akan terjadi, karena proses politiknya menjadi korban kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Karena itu, sebagaimana adagium/istilah yang dikenal, bahwasannya dalam masyarakat modern manusia menguasai alam demi tujuannya, sedangkan dalam masyarakat tradisional manusia hanya menyesuaikan diri terhadap kehendak alam. Kita dapat memandang bahwa pembangunan politik tergantung pada kemampuan untuk mengendalikan atau dikendalikan oleh perubahan sosial.

Peran-peran yang dilakukan untuk menciptakan perubahan teratur dan stabilitas dapat dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh 234 SC Tasikmalaya. Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tentunya harus lebih massif dan peduli terhadap masyarakat, karena konstruksi idealnya pun harus diarahkan kesana. Penulis akan membuktikan apakah 234 SC Tasikmalaya melakukan implementasi terhadap poin ini atukah tidak. Penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

### 2.1.3 Ciri-ciri Pembangunan Politik

Ciri-ciri pembangunan politik menurut Lucian W. Pye dalam Gaul Kadir (2016: 26) yaitu dengan mengumpulkan ciri-ciri utama dan mengidentifikasi tiga level atribut dalam mendefinisikan pembangunan politik, yaitu dengan persamaan (*equality*), kapasitas (*capacity*), dan diferensiasi (*differentiation*).

Persamaan atau *equality* ini mengacu pada penyelesaian masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga berhubungan dengan implementasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa golongan, artinya hukum bersifat universal. Kedua, *capacity* atau kapasitas bersangkutan dengan kemampuan sistem politik untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Aspek ini akan menganalisis kapasitas pemerintah dan kondisi yang mempengaruhi kinerja dalam membangun gagasan pembangunan politik. Ketiga, *differentiation* atau diferensiasi bersangkutan dengan pembagian kekuasaan dalam hal spesialisasi struktur serta fungsi jabatan dan badan-badan pemerintahan sehingga memiliki fungsi yang bekerja sesuai dengan *jobdesc* masing-masing dan terbatas karena adanya integrasi di dalam pemerintahan.

Ketiga ciri ini dapat dipandang sebagai inti dari proses pembangunan politik. Kita tidak mudah bisa menyatakan bahwa ketiga ciri itu cocok dan saling mengisi atau melengkapi, tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang timbul kecenderungan pertentangan akan tuntutan persamaan, prasyarat-prasyarat kapasitas dan proses diferensiasi dan spesialisasi yang makin luas.

Tuntutan ke arah persamaan yang besar dapat menjadi tantangan kapasitas sistem, dan diferensiasi serta spesialisasi bisa menurunkan persamaan karena perbedaan kualitas pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh warga negara. Misalnya, warga negara yang memiliki kualitas pengetahuan dan keahlian yang tinggi akan mampu bersaing untuk menduduki berbagai struktur yang ada dalam sistem politik, yang pada akhirnya muncul sebagai golongan elit dalam masyarakat. Sebaliknya bagi warga negara yang kurang mempunyai kualitas pengetahuan dan keahlian akan sulit bersaing menempati struktur sistem politik, meskipun ada persamaan kesempatan yang diberikan.

#### A. Persamaan (*Equality*)

Banyak pandangan tentang hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik menyangkut partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam kaitannya dengan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik (partisipasi politik), Huntington dan Nelson (dalam Gaul Kadir, 2016:26) memandang bahwa partisipasi politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik. Modernisasi pada bidang lain seperti ekonomi dan sosial dalam jangka panjang akan menghasilkan partisipasi politik yang lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan warga negara secara pribadi atau kolektif, terorganisasi atau spontan, terus-menerus atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Kegiatan-kegiatan warga negara tersebut merupakan kegiatan empirik yang dilakukan dalam

kehidupan bernegara. Dengan demikian sifatnya bukan lagi perasaan, idea melainkan sudah tindakan nyata.

Kemudian Huntington dan Nelson (1977) membedakan antara *autonomous participation* (partisipasi yang bersifat otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Tetapi sulit untuk menentukan ukuran-ukuran yang bisa memisahkan antara kedua tipe partisipasi politik tersebut di atas. Karena itu kedua tipe partisipasi politik tersebut hanya bisa dibedakan dalam konsep, tapi sulit dalam kenyataan empirik. Selanjutnya kedua penulis tadi mengemukakan bahwa wujud partisipasi politik dalam berbagai bentuk, yaitu:

- 1) *Electoral activity*; yaitu kegiatan pemilihan umum guna menentukan kepemimpinan nasional. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pemberian suara, pemberian sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, dan mencari dukungan untuk seorang calon atau setiap kegiatan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
- 2) *Lobbying*; yakni meliputi usaha-usaha perseorangan atau kelompok untuk mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya usaha untuk menumbuhkan dukungan terhadap keputusan administratif tertentu.

- 3) *Organizational Activity*; Kegiatan ini menyangkut keikutsertaan anggota atau pimpinan dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) *Contacting*; Mencari koneksi merupakan kegiatan perorangan yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pada seseorang atau sekelompok kecil anggota masyarakat.
- 5) *Violence*; yakni suatu kegiatan dengan menggunakan cara kekerasan agar pemerintah terpengaruh. Pengaruh tersebut diharapkan akan menyebabkan pemerintah meninjau kembali atau mengubah keputusan-keputusan tertentu, misalnya melalui huru-hara, demonstrasi, pemberontakan dan sebagainya.

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Miriam Budiardjo, 2008: 364). Di Indonesia, hal ini jelas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” Hal

ini menunjukkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan politik tertinggi ada di tangan rakyat yang dijalankan menurut undang-undang dasar.

Di samping uraian di muka, *equality* (persamaan) juga berarti bahwa hukum harus bersifat universal, artinya berlaku umum untuk semua warga negara. Hal ini sejalan dengan makna Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti pembinaan sistem hukum nasional dan prosedur-prosedur hukum haruslah jelas bagi seluruh warga negara.

Akhirnya, *equality* (persamaan) berarti pula proses rekrutmen politik atau seleksi pemimpin berdasarkan pada kemampuan atau prestasi kerja bukan atas dasar ikatan-ikatan primordial seperti ikatan keluarga, daerah dan sebagainya. Juga tidak atas dasar pertimbangan status yang bersandar pada sistem sosial tradisional. Karena itu pelaksanaan rekrutmen politik hendaknya terbuka bagi semua warga negara. Rekrutmen politik yang terbuka berarti setiap warga negara memperoleh peluang-peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Di samping itu, ada pula rekrutmen politik tertutup. Di sini tidak semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan politik dan pemerintahan, tetapi hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya orang-orang tersebut ada hubungannya dengan penguasa atas dasar ikatan-ikatan primordial. Hal ini tidak sesuai makna persamaan sebagai ciri pembangunan politik.

Kaitannya dengan yang akan penulis teliti adalah, aspek *equality* merupakan salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan pembangunan politik di suatu wilayah. 234 SC sebagai Organisasi Kemasyarakatan harus mengisi ruang-ruang persamaan itu dalam mewujudkan peran partisipasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Representasi dari masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk ideal dari suatu wilayah yang pembangunan politiknya berjalan.

#### B. Kapasitas (*Capacity*)

Menurut Gaul Kadir (2016:29) yang dimaksudkan kapasitas di sini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai *output* (hasil) sistem politik yang mampu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijaksanaan umum menjadi efektif dan efisien. Akhirnya kapasitas sistem politik berhubungan pula dengan rasionalisasi administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan umum.

Mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem politik menurut Almond dan Powell (dalam Gaul Kadir, 2016: 29) terdapat enam jenis, yaitu:

##### 1) *The Extractive Capability*

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi-potensi manusia (*material and human resources*). Melalui sumber-sumber ini, sudah bisa diduga segala kemungkinan dan tujuan apa saja yang dapat

diwujudkan oleh sistem politik. Kehidupan sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dapat dikumpulkan dari kemampuan ekstraktif ini.

Manusia (warga negara) akan memperoleh manfaat untuk membiayai kehidupannya melalui pengelolaan sumber daya alam dan negara juga memperoleh sumber pembiayaan melalui berbagai cara antara lain pembayaran pajak. Pengelolaan kekayaan alam hendaknya berdasarkan asas - asas berikut: (a) asas maksimal, artinya kekayaan alam harus memberi manfaat maksimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (b) asas lestari, maksudnya bahwa sumber kekayaan alam harus dipelihara kelestariannya agar dapat dimanfaatkan selama mungkin; (c) asas daya saing, artinya kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap negara lain. Sedangkan sumber daya manusia dikembangkan agar bisa ikut serta dalam proses pembangunan bangsa sesuai pendidikan, keahlian dan keterampilan masing-masing.

## 2) *The Distributive Capability*

Kemampuan distributif berkaitan erat dengan kemampuan ekstraktif, sebab sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber alam dan potensi manusia maka harus pula menunjukkan kemampuannya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang-barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dapat dipandang sebagai prestasi nyata sistem politik.

Distribusi tersebut ditujukan kepada individu atau kelompokkelompok dalam masyarakat. Pada hakikatnya apa yang harus didistribusikan bukan saja keuntungan-keuntungan, tetapi juga kerugian-kerugian, misalnya pendapatan negara (nasional) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didistribusikan untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi bila negara dalam keadaan kritis, misalnya menghadapi perang maka hal ini juga harus didistribusikan. Artinya setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.

### 3) *The Regulative Capability*

Kemampuan regulatif dimaksudkan bagaimana sistem politik menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya. Termasuk penempatan kekuatan-kekuatan yang sah untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manusia dan badan lain yang berada dalam sistem.

Bagaimana cara sistem politik membawa kelompok-kelompok atau masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku, misalnya bagaimana cara mereka menanggapi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ideologi nasional dan sebagainya. Sejauh mana kekuatan aturan-aturan tersebut menjangkau dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta bagaimana intensitas campur tangan sistem politik terhadapnya, semuanya merupakan ukuran dari

kemampuan regulatif. Misalnya dalam kehidupan ekonomi terjadi monopoli maka sistem politik harus menunjukkan kemampuan regulatifnya agar masyarakat tidak terkena gejolak harga yang disebabkan monopoli itu. Sistem juga harus mampu mencegah agar pengusaha bebas dari praktek ekonomi yang curang dan membina persaingan yang sehat.

#### 4) *The Responsive Capability*

Kemampuan responsif adalah kemampuan daya tanggap sistem politik yang ditentukan oleh hubungan antara input (aspirasi masyarakat) dengan output (kebijakan pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam ataupun lingkungan luar.

Dalam sistem kerajaan, di mana aktivitas birokrasi pemerintahan dikendalikan oleh raja bersama para pembantunya yang terdekat, hanya sedikit melibatkan diri terhadap tuntutan-tuntutan dari luar. Elit politik hampir selalu terikat pada satu sumber input sehingga kemampuan responsif semacam ini dianggap rendah.

Sebaliknya, pada sistem politik yang terbuka luas terhadap pengaruh input dari kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik, di mana kebijaksanaan elitnya peka dan tanggap, bisa dipandang kemampuan responsifnya tinggi.

#### 5) *The Symbolic Capability*

Kemampuan simbolik adalah mengalirnya secara efektif simbol-simbol nasional dari sistem politik ke dalam lingkungan dalam dan lingkungan luar sistem. Misalnya simbol-simbol persatuan nasional seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, lambang negara, bahasa nasional, Pancasila dan sebagainya yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia yang heterogen terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, aliran dan sebagainya telah dapat dipersatukan melalui ideologi nasional yakni Pancasila. Telah berulang kali negara kesatuan Republik Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi tetapi tetap dapat diatasi dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi nasional.

6) *Domestic and International Capability*

Kemampuan domestik dan internasional menunjukkan keberadaan sistem politik dalam lingkungan domestik (dalam negeri) maupun lingkungan internasional (luar negeri). Sistem politik dalam bekerja, mengadakan hubungan atau interaksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Karena itu tingkah laku internasional suatu sistem politik bisa dilihat dari segi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik dan responsif internasional sistem politik bersangkutan, misalnya kemampuan ekstraktif internasional suatu sistem politik dapat dilihat dari besarnya

pendapatan yang diperoleh dalam perdagangan internasional, keuntungan dari penanaman modal di negara lain dan sebagainya.

Kaitannya dengan hal yang akan penulis teliti adalah, aspek kapasitas bukan hanya tentang peran-peran yang dimainkan oleh infrastruktur politik maupun suprastruktur politik saja. Suatu Organisasi Kemasyarakatan, seperti 234 SC dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pembangunan politik bagi masyarakat, dengan memanfaatkan kapasitas yang dimiliki. Sederhananya adalah, suatu peran maupun kontribusi yang nyata tentunya berdasarkan analisis nyata dan pertimbangan yang matang dan tidak gegabah. Penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam bab selanjutnya.

### C. Pembedaan (*Differentiation*)

Ciri pembangunan politik ini berkaitan dengan analisis tentang struktur dan fungsi. Dengan demikian pembangunan politik pertama-tama mengenai diferensiasi dan spesialisasi struktur. Lembaga-lembaga pemerintahan masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terdapat pembagian kerja di dalamnya.

Diferensiasi dapat menimbulkan peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan lembaga-lembaga politik dalam sistem politik. Juga diferensiasi menyangkut integrasi dari struktur dan proses politik. Dengan demikian diferensiasi bukanlah fragmentasi dan isolasi

masing-masing bagian dari sistem, melainkan spesialisasi berdasarkan pemahaman kesatuan yang menyeluruh.

Struktur politik terdiri dari lembaga-lembaga politik baik yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai infra struktur politik maupun yang ada dalam pemerintahan disebut supra struktur politik. Sedangkan proses politik adalah interaksi atau pengaruh timbal balik dari lembaga-lembaga politik yang ada dalam sistem politik. Infra struktur politik dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, serikat buruh, organisasi pemuda, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan sebagainya. Sedangkan supra struktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Di Indonesia misalnya MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga lain yang dikelola pemerintah.

Infrastruktur politik antara lain berfungsi merumuskan segala kepentingan masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada lembaga-lembaga supra struktur politik. Selanjutnya lembaga supra struktur politik memproses segala kepentingan itu untuk menetapkan satu keputusan bersama. Tetapi proses kegiatan yang dilaksanakan supra struktur politik pada hakikatnya berdasarkan aspirasi, dukungan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Lebih lanjut lembaga supra

struktur politik berfungsi mengalokasikan kembali nilai-nilai keputusan bersama itu kepada masyarakat. Nilai keputusan bersama inilah dipandang sebagai nilai-nilai otoritatif, artinya nilai-nilai yang berada dalam wewenang pemerintah. Karena itu infra struktur politik mempunyai hubungan yang erat dengan supra struktur politik. Proses kerja keduanya saling berhubungan, kohesif dan interdependensi sehingga totalitas sistem bisa terpelihara untuk keberlangsungannya.

Berdasar atas keterangan menurut para ahli mengenai pembangunan politik, maka diambil keterangan bahwa pembangunan politik merupakan suatu konsep yang mewakili peningkatan kemampuan wawasan, pengetahuan, praktik, dan etika dalam berpolitik yang pada akhirnya dapat mengubah suatu idealisme sistem politik menjadi sistem baru yang lebih baik bagi masyarakat yang terlibat dan merasakan dampaknya.

Aspek diferensiasi dalam hal ini, serta kaitannya dengan apa yang akan penulis teliti adalah mengenai 234 SC yang ketika penulis buktikan dapat memainkan peran dalam upaya pembangunan politik bagi generasi muda itu dapat terwujud. Dalam konteks antropologi ketika hal itu terjadi, maka 234 SC dapat menjadi pembeda dari Organisasi Kemasyarakatan ataupun dari elemen lainnya, bahkan dari pihak pemerintah sekalipun. Hal ini akan penulis buktikan dalam bab selanjutnya.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembangunan politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti yang pertama adalah Adityawarman (2020) dengan judul “Pembangunan Politik Dan Kualitas Demokrasi” yang menyatakan bahwa dalam mendapatkan output yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politik sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi.

Selanjutnya penelitian Taufik Effendy (2013) yang berjudul “Premanisme Dan Pembangunan Politik Di Indonesia” menyatakan bahwa premanisme pascaorde baru memiliki pengaruh dalam konteks modernisasi dan *shadow state*. Dimana kedua hal tersebut merupakan dampak dari adanya pembangunan politik yang dilakukan pada preman-preman atau *jago* yang ada di kota-kota besar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Astanto (2007) berjudul “Menyimak Pembangunan Politik Di Indonesia”, penulis menyatakan bahwa pembangunan politik di Indonesia dapat digunakan untuk mengantisipasi tantangan baru dalam kancah dunia politik. Disamping itu, diperlukan pula keterbukaan dalam berbagai dimensi kehidupan politik dan menumbuhkan budaya politik yang lebih matang atau dewasa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Sidi Ritaudin (2014) berjudul “Pembangunan Politik Pendidikan Menuju Masyarakat Bermartabat” menyatakan bahwa pembangunan politik harus dikaitkan dengan pendidikan demi menghadapi kemajuan teknologi yang melahirkan revolusi komunikasi di era global. Pendidikan Islam menjadi potensi yang paling tinggi sebagai variabel independen dalam memberi makna dan nilai pendidikan yang berkualitas dan beradab.

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu yakni sama sama meneliti dalam hal Pembangunan politik namun pokok pembahasan dan objek penelitian yang berbeda dengan apa yang ingin dicari oleh peneliti, Adapun penelitian yang diambil oleh peneliti bermaksud atau bertujuan terkait bagaimana Pembangunan politik itu terbentuk dan menghasilkan Pendidikan politik terhadap generasi muda yang menjadi pokok bahasannya yakni Langkah atau peran dari komunitas 234 SC Tasikmalaya yang menghasilkan efek atau sifat membangun terhadap pemikiran generasi muda di Tasikmalaya. Penelitian-penelitian diatas berguna bagi penulis dalam mengungkap cita-cita maupun tujuan suatu upaya pembangunan politik bagi masyarakat. Tujuan akhir dari pembangunan politik adalah menciptakan kesejahteraan yang selaras dengan *value* politik yang dibangun.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pembangunan politik mengacu pada makna perubahan politik sebagai akibat terjadinya perbedaan pada karakteristik dari suatu sistem politik asal ke sistem politik lain yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan pada struktur sosial masyarakat. Pembangunan politik identik dengan modernisasi karena dapat mempengaruhi perkembangan tatanan kehidupan secara menyeluruh seperti pada aspek ekonomi, pendidikan, urbanisasi, dan lain-lain. (Ramlan Surbakti Dalam Aditiyawarman, 2020).

Pembangunan politik dijadikan sebagai kajian dengan tujuan untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi. Konteks dalam pembangunan politik ini lebih mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang, dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi, integrasi, dan demokratisasi yang belum berjalan dengan baik.

Pembangunan politik merupakan bagian modernisasi yang wajib untuk dipelajari karena untuk menghadapi tantangan global, para generasi muda harus dibekali dengan pengetahuan dan kecakapan dalam politik yang membelit ke berbagai unsur, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat industri, pembangunan modernisasi, operasi negara-bangsa, pembangunan administrasi dan hukum, mobilisasi dan partisipasi massa, pembinaan demokrasi, stabilitas dan perubahan

teratur, mobilisasi dan kekuasaan, dan proses perubahan multidimensional.

Input dari kerangka pemikiran ini dimulai dari peran 234 SC Tasikmalaya yang melakukan berbagai inisiasi/aktivitas yang mengarah kepada pembangunan politik di Tasikmalaya. Meskipun identifikasi hal tersebut tidak disadari sebagai upaya/peran dalam rangka berkontribusi dalam pembangunan politik, tetapi implikasi nyata dirasakan oleh masyarakat yang menerima manfaat, terkhusus generasi muda Tasikmalaya. Tujuan yang dilakukan dalam upaya pembangunan politik tersebut mengarah pada dua aspek, yaitu pembinaan demokrasi dan perubahan teratur serta stabilitas yang dicita-citakan terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, khususnya generasi muda.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

